

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal

pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Danggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU

Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

2.1.2. Arti Lambang Kabupaten Bantul

Gambar 2.1
Lambang Kabupaten Bantul



Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah *Ellipse* (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan "KABUPATEN BANTUL" Di dalam

bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :

- (1) Keadaan Alam
- (2) Kekayaan Alam
- (3) Latar Belakang Sejarah
- (4) Semangat dan Cita-cita
- (5) Persatuan dan Kesatuan
- (6) Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horizontal 30 dan garis tengah Vertikal

40

Arti dan makna lambang

- (1) Landasan Idiil Pancasila
- (2) Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (4) Lukisan Dalam Warna Merah , Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- (5) Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- (6) Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (7) Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.

- (8) Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO” Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima
- (9) Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
- (10) Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.

- (1) Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut.
- (2) Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
- (3) Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:
 - (a) Bidang Legislatif
 - (b) Bidang Eksekutif
 - (c) Bidang Yudikatif

(4) Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelepah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :

- (a) Sosial Control
- (b) Sosial Support
- (c) Sosial Participation
- (d) Sosial Responsibility

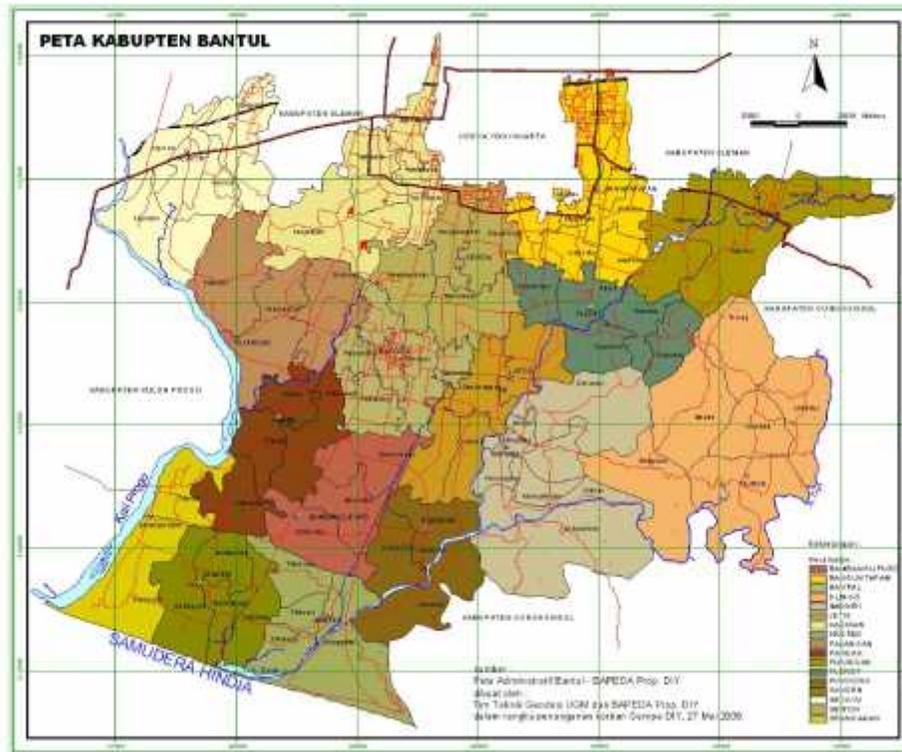
(5) Hasil Produksi Daerah Kabupaten bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan ekspor dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.

Warna dan Arti

- (1) Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran
- (2) Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian
- (3) Biru : Berarti kesetiaan
- (4) Kuning & Kuning Emas : Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran
- (5) Merah : Berarti keberanian
- (6) Putih : Berarti kesucian
- (7) Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.

2.1.3. Batas Wilayah Kabupaten Bantul

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari

separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

2.1.4. Pemerintahan Kabupaten Bantul

Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

(1) Kependudukan

Hasil Registrasi Peduduk Awal Tahun 2012

(1) Total Penduduk (Jiwa) 930.276 jiwa

(2) Kepala Keluarga (KK) 250.806 kk

(3) Mutasi Penduduk Tahun 2011

(a) Lahir (L) 9.499 = 0.94 %

(b) Datang (D) 14.358 = 1.41 %

(c) Mati (M) 4.578 = 0,45 %

(d) Pergi (P) $11.350 = 1,12 \%$

(4) Kenaikan Penduduk = -

(5) Kenaikan Alami (L-M) = 7.929

(6) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93¹

2.2. Deskripsi Objek Penelitian

2.2.1. Gambaran umum DPRD Kabupaten Bantul

DPRD Kabupaten Bantul masa bakti 2014-2019 diambil sumpah dan janjinya pada tanggal 13 Agustus 2014. Sejumlah 45 Caleg terpilih resmi disahkan menjadi anggota DPRD melalui Rapat Paripurna istimewa tersebut, adapun komposisi anggota berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut:

- (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 12 Anggota
- (2) Partai Gerakan Indonesia Raya : 6 Anggota
- (3) Partai Amanat Nasional : 6 Anggota
- (4) Partai Golongan Karya : 5 Anggota
- (5) Partai Kebangkitan Bangsa : 4 Anggota
- (6) Partai Keadilan Sejahtera : 4 Anggota
- (7) Partai Persatuan Pembangunan : 4 Anggota
- (8) Partai Nasional Demokrat : 2 Anggota
- (9) Partai Bulan dan Bintang : 1 Anggota
- (10) Partai Demokrat : 1 Anggota

¹<http://www.bantulkab.co.id>

Dari 10 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bantul, terbentuk 8 fraksi yaitu:

- (1) Fraksi PDI Perjuangan
- (2) Fraksi Gerindra
- (3) Fraksi Amanat Nasional
- (4) Fraksi Golkar
- (5) Fraksi Kebangkitan Bangsa
- (6) Fraksi Keadilan Sejahtera
- (7) Fraksi Persatuan Pembangunan
- (8) Fraksi Nasional Bintang Demokrat yang merupakan gabungan Partai Nasional Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat.²

2.2.2. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bantul

a. VISI

Terwujudnya pelayanan prima

b. MISI

- (1) Mendorong tercapainya produk hokum DPRD yang berkualitas;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas;
- (3) Menyempurnakan uraian tugas dan pedoman kerja;
- (4) Mengelola dokumen, informasi,perpustakaan, dan risalah sidang DPRD;
- (5) Mengemban hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif agar produktif;³

²<http://www.dprd.bantulkab.go.id> diakses 28 februari

2.2.3. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bantul

PIMPINAN

Terdiri dari 1 orang ketua, didampingi 3 orang wakil ketua

Ketua :

Hanung Raharjo, ST- Fraksi PDIP

Wakil ketua :

1. Nur Subiantoro, SI.Kom- Fraksi Gerindra,
2. Mahmud Ardi Widanto, SIP- Fraksi PAN
3. Hj. Arni Tyas Palupi, ST- Fraksi GOLKAR

Tabel 2.1
Anggota DPRD Kabupaten Bantul

NO	NAMA	PARTAI
1	Pramu Diananto Indratriatmo	PDI Perjuangan
2	Drs. Timbul Harjana	PDI Perjuangan
3	Purwana	PDI Perjuangan
4	Sugeng Sudaryanta	PDI Perjuangan
5	Sudarmanta	PDI Perjuangan
6	Dwi Kristiantoro, ST	PDI Perjuangan
7	Drs. Pambudi Mulya	PDI Perjuangan
8	Hanung Raharjo, ST	PDI Perjuangan
9	Suratman	PDI Perjuangan
10	H. Ispriyatun Katir Tri Atmojo	PDI Perjuangan
11	Yudha Prathesianta Wibowo, SE	PDI Perjuangan
12	Endro Sulastomo, SH	PDI Perjuangan
13	Suwandi, SIP	Partai Persatuan Pembangunan
14	Jumakir	Partai Persatuan Pembangunan
15	Eko Sutrisno Aji	Partai Persatuan Pembangunan
16	Reshi Cahyadi	Partai Persatuan Pembangunan
17	Subhan Nawwawi	Partai Kebangkitan Bangsa
18	Suradal	Partai Kebangkitan Bangsa

³ Ibit diakses 25 desember

19	Uwaisun Nawawi	Partai Kebangkitan Bangsa
20	Nur Laili Maharani, A.Md.	Partai Kebangkitan Bangsa
21	H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
22	Muhammad Dhavid, S.Pt	Partai Keadilan Sejahtera
23	Amir Syarifudin	Partai Keadilan Sejahtera
24	Setiya	Partai Keadilan Sejahtera
25	Arni Tyas Palupi, ST	Partai GOLKAR
26	Widodo, A.Md	Partai GOLKAR
27	Heru Sudiby, S.Sos, MM	Partai GOLKAR
28	Paidi, SIP	Partai GOLKAR
29	H. Suryono	Partai GOLKAR
30	Enggar Suryo Jatmiko SE	Partai GERINDRA
31	Petrus Lanjar Wijiyono	Partai GERINDRA
32	Datin Wisnu Pranyoto	Partai GERINDRA
33	Sudarto, BA., S.Th.	Partai GERINDRA
34	Nur Subiyantoro, S.I.Kom	Partai GERINDRA
35	Gayuh Pramudhita	Partai GERINDRA
36	H.R Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Partai Amanat Nasional
37	Sarinto, S.Pd.	Partai Amanat Nasional
38	Sadji, S.Pd.I	Partai Amanat Nasional
39	Mahmud Ardi Widanto, SIP	Partai Amanat Nasional
40	Suratun, SH	Partai Amanat Nasional
41	Wildan Nafis, SE	Partai Amanat Nasional
42	H. Bibit Rustamta, SH	Partai Nasional Demokrat
43	Sapta Sarosa, S.Psi	Partai Nasional Demokrat
44	Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.	Partai Demokrat
45	H. Supriyono, M.Si	Partai Bulan Bintang

2.2.4. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- (1) Membentuk Perda bersama bupati;
- (2) Membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
- (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- (4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- (5) Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
- (6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5. Kewajiban dan Hak DPRD

(1) Hak DPRD :

- (a) Hak Interpelasi Yaitu Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah. Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- (b) Hak Angket yaitu Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Hak menyatakan pendapat yaitu Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelas dan hak angket.

(2) Kewajiban DPRD :

- (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- (b) Melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan
- (c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
- (d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- (e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- (f) Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- (g) Mentaati tata tertib dan kode etik
- (h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota
- (i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- (j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

(k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.2.6. Fungsi DPRD:

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

(1) Legislasi,

Fungsi Legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.⁴ Fungsi legislatif memiliki makna yang penting dalam menjalankan tugas DPRD yaitu :

- (a) Menentukan arah pembangunan pemerintah di daerah
- (b) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah
- (c) Sebagai kontrak sosial di daerah
- (d) Pendukung pembuatan perangkat daerah dan susunan oragnisasi perangkat daerah.

(2) Anggaran,

Fungsi Anggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif,

⁴Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006. Lihat pula Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, www.parlemen.net

proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.

Fungsi anggaran haruslah mendapat perhatian khusus, mengingat makna pentingnya dalam berjalannya tugas-tugas DPRD, yaitu :

- (a) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi)
- (b) APBD sebagai inventasi daerah
- (c) APBD sebagai fungsi manajemen pemerintah daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi dan fungsi pengawasan)

(3) Pengawasan,

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini sangat baik bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan menjadi peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan peraturan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Fungsi pengawasan memiliki tujuan utama yaitu :

- (a) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- (b) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- (c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;

(d) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁵

Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

2.2.7. Alat Kelengkapan DPRD

Dalam rangka melaksanakan dan fungsinya DPRD kabupaten Bantul dilengkapi dengan alat kelembagaan berupa :

- (1) Pimpinan Dewan terdiri dari 4 orang
- (2) Komisi-Komisi(A, B, C, D)
- (3) Badan Musyawarah
- (4) Badan Anggaran
- (5) Badan Legislasi
- (6) Badan Kehormatan

Dari alat kelembagaan yang ada dan bersifat tetap DPRD juga didukung alat kelembagaan yang tidak tetap yang biasanya berbentuk : Panitia Khusus (PANSUS).⁶

2.2.8. Profil anggota DPRD perempuan di DPRD Kabupaten Bantul

a. Arni Tyas Palupi, S.T

Nama : Hj. Arni Tyas Palupi, S.T

Alamat : Nyangkringan, Bantul Yogyakarta

⁵http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf

⁶<http://www.dprd.bantulkab.go.id>

Pendidikan : Sarjana Teknik Universitas Islam Indonesia

Jabatan : Ketua III DPRD Kabupaten Bantul

Asal Partai : Partai Golongan Karya (GOLKAR)

b. Suratun, S.H

Nama : Suratun, S.H

Alamat : Sedayu

Pendidikan : Sarjana Hukum

Jabatan : Ketua Badan Kehormatan

Asal Partai : Partai Amanat Nasional

c. Nur Laili Maharani, Amd

Nama : Nur Laili Maharani, Amd

Alamat : Piyungan

Pendidikan : Diploma III

Jabatan : Anggota Badan Legislasi

Asal Partai : Partai Kebangkitan Bangsa